KR-Franz Boedisukarnanto

PENUKARAN UANG BARU: Riskiyanto, warga kampung Bugisan, Yogyakarta, melayani konsumen yang menukarkan uang baru di lapak sementara di Jalan P Senopati, Yogyakarta, Rabu (5/3/2025). Beberapa penjual jasa sudah membuka lapak penukaran uang baru menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1446 H di kawasan tersebut.

MENTERI PAN-RB SEBUT

Pengangkatan CPNS Jadi Oktober 2025

JAKARTA (KR) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini mengatakan, jadwal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) disesuaikan menjadi Oktober 2025.

Menurutnya, hal itu bukan penundaan, melainkan agar semua CPNS bisa diangkat secara bersamaan. Hal tersebut juga mempertimbangkan kebutuhan penataan serta penempatan ASN untuk mendukung program prioritas pembangunan.

"Kan baru diputuskan barusan, DPR sama Pemerintah sudah sepakat untuk semuanya akan diselesaikan. Oktober CPNS," kata Rini usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/3).

Rini Widyantini pun memastikan penyesuaian pengangkatan CPNS itu bukan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah. Karena, pihaknya perlu menyelesaikan pengumuman-pengumuman terkait CPNS di berbagai instansi.

"Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN," katanya.

Menteri PAN-RB mengatakan, penyesuaian itu mempertimbangkan untuk menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN hingga penataan ASN nasional secara menyeluruh. Selain itu, ada juga usulan penundaan seleksi oleh beberapa daerah.

Setelah melewati tahapan pengadaan CASN tahun 2024, ia mencatat ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, yaitu terkait adanya beberapa instansi yang menunda penyelesaian dan pengadaan CPNS. "Yang kedua, usulan formasi yang disampaikan Pemerintah itu tidak optimal, jadi tidak sesuai dengan data kami," kata dia.

Kemudian, katanya, instansi yang tidak mengusulkan formasi sesuai kualifikasi pendidikan dan jabatan bagi pelamar yang sudah terdata di dalam database BKN. Selain itu, ada juga pelamar yang mendaftar pada unit kerja yang tidak sesuai dengan data yang bersangkutan. **(Ant/San)-d**

RANGKAIAN EKSTRADISI KE INDONESIA

Tannos Jalani Proses Penuntutan di Singapura

JAKARTA (KR) - Buron kasus korupsi proyek KTP elektronik Paulus Tannos saat ini sedang menjalani proses penuntutan di Singapura. Proses penuntutan tersebut adalah bagian dari rangkaian proses hukum dalam rangka ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia.

"Saya dapat informasi bahwa karena sistem yang ada di negara Singapura berbeda dengan kita, maka yang bersangkutan (Paulus Tannos) saat ini sedang dalam proses penuntutan," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu (5/3).

Menurutnya, KPK saat ini masih menunggu rampungnya proses penuntutan tersebut. Setelah proses tersebut rampung, pemerintah Indonesia baru bisa mengambil langkah selanjutnya. "Nah, dari proses penuntutan itu nanti akan ada sebuah keputusan untuk proses selanjutnya," ujarnya.

Mengenai tenggat waktu yang diberikan pemerintah Singapura pada tanggal 3 Maret 2025, Setyo mengatakan tenggat waktu tersebut sudah tidak diperlukan. Karena karena ada proses penuntutan yang sedang berjalan di Singapura.

"Kan kemarin batas waktu tanggal 3 (Maret 2025) kan, tetapi setelah itu ada proses penuntutan, ya itu tadi karena ada sistem hukum yang berbeda," tuturnya. **(Ant/Has)-d**

Dilakukan

Sambungan hal 1

Curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dalam tiga hari terakhir. Keadaan tersebut harus direspons serius oleh Pemerintah Pusat karena peristiwa tersebut selalu berulang setiap tahunnya.

Selain itu, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Muhammad Khozin mendesak Pemerintah Pusat untuk melakukan penanganan banjir di wilayah Jabodetabek secara komprehensif dan holistik. "Kami meminta Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membuat legacy penanganan banjir di wilayah Jabodetabek dengan pimpin kebijakan yang holistik dan komprehensif dari hulu hingga hilir," kata Khozin di Gedung DPR Senayan, Jakarta.

Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta mengenai tanggap darurat banjir menegaskan agar aksi tanggap banjir berfokus pada dua klaster yakni logistik dan lokasi penampungan. Demikian juga untuk seluruh pihak terkait seperti Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar melakukan koordinasi lintas unit untuk memastikan upaya penanganan yang prima.

Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan, jajarannya siap bersinergi dengan para pihak terkait dalam melaksanakan aksi cepat tanggap sesuai arahan Presiden. "Upaya yang dilakukan BNPB beserta pihak terkait di antaranya aktivasi Posko Terpadu Penanggulangan Bencana, melaksanakan pencarian, evakuasi dan penyelamatan masyarakat terdampak, memastikan kebutuhan dasar pengungsi dipenuhi secara maksimal, dan melakukan pendataan terhadap barang, rumah masyarakat, infrastruktur, dan lain-lain yang rusak akibat banjir," papar Suharyanto.

Perum Pondok Gede Permai (PGP), Jatirasa, Jatiasih, Bekasi merupakan salah satu titik evakuasi terbesar dalam musibah banjir ini dengan ketinggian air mencapai 3 meter. Selain perumahan warga, di kompleks ini juga terdampak fasilitas warga lainnya seperti SD Jatirasa 5. **(Ant/Ful/Ati)-f**

Polri

Sambungan hal 1

pidana narkoba dengan jumlah tersangka 9.586 orang," kata Kepala Bareskrim (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Wahyu Widada di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (5/3).

Dari 9.856 tersangka, kata Wahyu Widada, tidak seluruhnya diproses secara hukum, tetapi ada juga yang melalui keadilan restoratif (restorative justice) dan menjalani rehabilitasi setelah melalui proses Tim Asesmen Terpadu (TAT).

Dalam pengungkapan periode dua bulan ini, terdapat 16 warga negara asing (WNA) yang ditangkap, yakni dari Amerika, Jerman, Turki, Australia, Lithuania, Inggris, India, dan Malaysia.

Terkait dengan barang bukti, jenderal bintang tiga itu mengatakan, pihaknya telah berhasil menyita barang bukti seberat sekitar 4,1 ton dalam kurun waktu dua bulan ini. Barang bukti yang disita terdiri sabu-sabu seberat 1,28 ton, ekstasi 138,7 kilogram atau sebanyak 346.959 butir, ganja 493 kg, kokain 3,4 kg, tembakau sintetis atau tembakau gorila 1,6 ton, dan obat keras sebanyak 2.199.726 butir atau sekitar 659,9 kg. "Dari itu semua, kalau dijumlah nilai estimasi dari nilai jumlah barang bukti yang berhasil disita, apabila dikonversikan ke dalam rupiah, sekitar Rp 2,72 triliun," ucapnya.

Dari barang bukti 4,1 ton yang disita, kata Wahyu, diestimasi dapat menyelamatkan jiwa sebanyak 11.407.315 orang terkait dengan penggunaan narkoba. **(Ant/San)-f**

Mulai

Sambungan hal 1

Perubahan jadwal libur Lebaran 2025 sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan agama itu sesuai dengan pertemuan Menteri Perhubungan, peraturan Menteri PANRB mengenai *work from anywhere* (WFA). Hal itu juga berdasarkan arahan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono agar Pemerintah memberlakukan WFA mulai H-7 Lebaran. **(Ant/Has)-d**

Komandan

Sambungan hal 1

Israel sendiri meminta demiliterisasi Jalur Gaza sebagai syarat untuk melaksanakan tahap kedua kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas. "Kami tidak punya kesepakatan pada tahap kedua," kata Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar dalam konferensi pers, Selasa (4/3) waktu setempat.

Israel juga menuntut kelompok perlawanan Palestina itu menyerahkan semua sandera. Jika Hamas menyetujui tuntutan ini, Israel dapat melaksanakan (tahap kedua kesepakatan gencatan senjata) besok. **(Ant/Has)-d**

Banjir

Sambungan hal 1

Namun, jika banjir terus berulang dan semakin parah setiap tahunnya, ini jelas masalah sistemik. Banjir lokal bisa jadi karena orang buang sampah sembarangan. Banjir kolosal bisa jadi karena orang kasih izin investasi sembarangan.

Masalah sistemik bisa ditangani dengan solusi sistem-teknis seperti membangun bendungan baru, memasang pompa, atau membuat kanal tambahan. Namun, jika masalahnya lebih dalamóseperti tata ruang yang diabaikan, kemiskinan yang memaksa warga tinggal di bantaran sungai, keserakahan yang menyebabkan hutan gundul di hulu, anggaran yang tidak fleksibel untuk menangani bencana, serta pejabat yang abai dalam pengawasan infrastrukturómaka ini sudah masuk ke ranah sistem-non teknis. Lebih jauh lagi, jika segala sesuatu harus diserahkan kepada mekanisme pasar dan proses demokratis yang seringkali tidak menghasilkan kebijakan berpihak kepada rakyat, maka persoalannya sudah bersifat ideologis.

Sayangnya, alih-alih melihat masalah secara mendalam, banyak orang justru dengan mudah menyalahkan rakyat. Banjir? Salah rakyat yang buang sampah sembarangan. Pengangguran tinggi? Salah rakyat yang pemalas. Hutan rusak? Salah rakyat yang membuka kebun. Pokoknya, semua salah rakyat.

Dalam Islam, baik-buruknya rakyat tergantung pada pemimpinnya. Dan baik-buruknya pemimpin tergantung pada para intelektualnya. Apakah para ulama masih berani menasihati pemimpin? Apakah para ilmuwan masih berani mengingatkan penguasa? Ataukah setiap kritik yang tidak memuji disebut sebagai hinaan, dan siapa pun yang mengkritik dicap radikal serta pantas diusir dari negeri sendiri? Jika para intelektual bungkam, maka jangan berharap ada perubahan yang nyata.

Penanggulangan banjir harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan empat siklus utama: mitigasi, peringatan dini, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Pada tahap mitigasi, analisis big data dan pemetaan bencana berbasis citra satelit seharusnya bisa digunakan untuk menganalisis potensi banjir. Namun, jika peta tata ruang saja dibuat tergesa-gesa tanpa kajian mendalam, bagaimana bisa diandalkan untuk mencegah bencana?

Pada tahap peringatan dini, seharusnya teknologi 4.0 seperti crowd-sourcing, IoT, dan AI bisa dimanfaatkan. Ribuan CCTV di berbagai lokasi mestinya tidak hanya menjadi pajangan, tetapi juga dianalisis secara real-time untuk memberikan peringatan dini yang akurat. Realitasnya, sistem ini masih belum optimal. Saat banjir terjadi, sistem tanggap darurat yang baik seharusnya dapat membantu masyarakat dengan informasi evakuasi yang akurat dan pendistribusian bantuan yang merata. Sayangnya, di Bekasi, banyak warga mengeluhkan lambatnya respons pemerintah. Sehingga banyak yang harus bertahan sendiri dalam kondisi yang sulit.

Setelah banjir surut, rekonstruksi harus dilakukan cepat dan melibatkan banyak pihak. Teknologi digital bisa membantu dalam hal ini. Namun, jika sistem anggaran dan pengawasan masih lemah, rekonstruksi hanya akan menjadi proyek yang tidak efektif.

Kapan penanggulangan banjir yang efektif bisa dimulai? Secara parsial, sekarang juga. Beberapa komunitas dan LSM sudah memulai langkah-langkah inovatif, meskipun masih berskala kecil. Namun, untuk benar-benar menyelesaikan masalah ini, diperlukan perubahan yang lebih besaróbukan hanya secara teknis, tetapi juga sistemik, bahkan ideologis. Sebab, tanpa perubahan mendasar, banjir akan terus berulang, semakin parah, dan semakin sulit diatasi. ❑**-d**

(Penulis, Peneliti Geoinformatika Multidisiplin)

Politik

Sambungan hal 1

"Untuk *money politics* dan netralitas, bagaimanapun sistemnya kita bangun, kita bentuk, itu tidak akan terjadi perubahan yang radikal kalau tidak (ada perubahan) perilakunya," katanya.

Ia memandang desain sistem pemilu sebaik apapun pada akhirnya akan menjadi percuma, sebab bergantung pada perilaku penyelenggara pemilu hingga peserta pemilu itu sendiri. "Saya percaya betul peribahasa yang bilang *the right system will produce the right result*, sistem yang baik (akan) menghasilkan hasil yang baik, tetapi kalau yang menjalankan sistemnya juga *nggak* baik, susah ini," tuturnya.

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menyoroti pula aspek moralitas lembaga penyelenggara pemilu. Pihaknya menekankan pentingnya perbaikan perilaku penyelenggara dan pengawas pemilu yang disebutnya sebagai faktor internal, di atas pembenahan sistem kepemiluan di tanah.

"Ketika penyelenggara dan pengawas yang menjadi bagian dari kerusakan itu, gimana *sih ngatasin* itu, kalau kita mau bicara memperbaiki pemilu? Karena tidak ada sistem pemilu yang bisa dikatakan sempurna bahkan mendekati sempurna, tidak akan ada," kata Deddy.

Selain faktor internal, ia mencatat pula pentingnya memberi perhatian terhadap faktor eksternal dalam memperbaiki sistem kepemiluan di tanah air, yakni 'cawe-cawe' kekuasaan demi memenangkan kontestasi. **(Ant/Obi)-d**

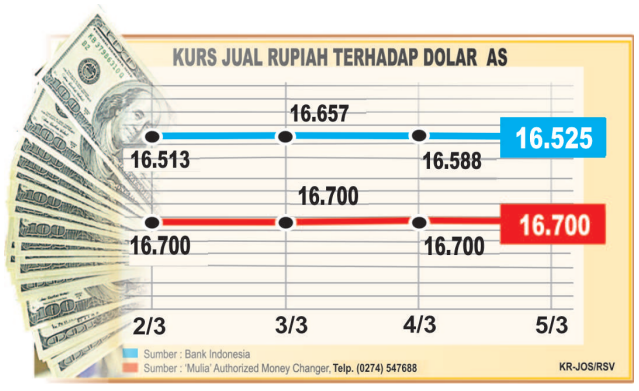

Prakiraan Cuaca — Kamis, 6 Maret 2025

Lokasi	Cuaca: Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95

Cerah, Berawan, Udara Kabur, Hujan Lokal, Hujan Petir

Grafis : Arko

Dampak Deflasi Bagi Perekonomian Indonesia

Alfriadi Dwi Atmoko, SE, MSi, Ak, CA, ACPA
Dosen Akuntansi Universitas Amikom Yogyakarta

BERDASARKAN pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Februari 2025 Indeks Harga Konsumsi (IHK) pada bulan februari 2025 mencetak deflasi 0,48% secara bulanan (month to month/mtm) dan secara tahunan (year on year/yoy) mencetak deflasi sebesar 0,09%. Nah lalu apa dampaknya terhadap perekonomian di Indonesia? Berikut adalah beberapa dampak utama:

Dampak Negatif:

Melemahnya Pertumbuhan Ekonomi. Deflasi menandakan daya beli masyarakat yang menurun, yang dapat mengurangi permintaan barang dan jasa. Hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi karena produsen enggan berinvestasi atau menambah produksi.

Peningkatan Beban Utang Riil. Dengan harga yang menurun, nilai riil utang meningkat karena uang yang dikembalikan memiliki daya beli lebih tinggi dibanding saat dipinjam. Ini bisa memperberat beban utang rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah.

Meningkatnya Pengangguran. Perusahaan akan mengalami penurunan keuntungan akibat harga jual yang lebih rendah. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk mengurangi produksi dan tenaga kerja, sehingga angka pengangguran meningkat.

Siklus Deflasi yang Berkepanjangan Jika masyarakat menunda konsumsi dengan harapan harga akan terus turun, maka permintaan akan semakin menurun. Ini bisa menciptakan lingkaran deflasi yang sulit dipulihkan tanpa intervensi kebijakan moneter dan fiskal.

Dampak Positif (Terbatas):

Meningkatkan Daya Beli Konsumen (Secara Nominal). Harga barang dan jasa yang lebih murah dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang memiliki pendapatan tetap. Namun, ini hanya menguntungkan jika deflasi tidak berkepanjangan dan tidak menyebabkan ketidakstabilan ekonomi.

Menurunkan Biaya Impor. Jika deflasi diiringi dengan apresiasi nilai tukar Rupiah, maka harga barang impor akan lebih murah. Hal ini dapat membantu sektor industri yang bergantung pada bahan baku impor.

Nah itulah dampak yang akan terjadi pada perekonomian di Indonesia apabila kondisi ini berlangsung secara jangka panjang. Oleh karena itu pemerintah diharapkan dapat memberikan kebijakan perekonomian untuk mengatasi permasalahan ini salah satunya dengan memberikan kebijakan moneter ekspansif dengan menurunkan suku bunga guna mendorong kredit dan investasi. Selain itu juga dapat memberikan kebijakan fiskal dengan memberikan insentif pajak untuk meningkatkan konsumsi dan investasi. Pemerintah juga dapat mengintervensi di pasar tenaga kerja melalui program padat karya atau subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat.

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park